

SKRIPSI

**ANALISIS FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH (DIPENDA)
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KABUPATEN BENGKALIS**

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Sosial Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



DISUSUN OLEH :

RUDY AGUSTIAN
105 7600 2273

PROGRAM S1

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2009**

ABSTRAK

ANALISIS FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH (DIPENDA) KABUPATEN BENGKALIS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BENGKALIS

OLEH : RUDY AGUSTIAN
NIM. 10576002273

Fungsi Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Bengkalis adalah perwujudan dari segala tugas pemerintahan yaitu pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis di bidang pendapatan daerah dan sekaligus menjadi urusan rumah tangga daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pada tanggal 10 November 2008 hingga tanggal 1 September 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan fungsi Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis dan untuk mengetahui upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis. Adapun variabel penelitian ini terdiri dari kemampuan dan pengetahuan, sistem administrasi yang fleksibel, ketegasan dan sanksi, kesadaran masyarakat dan pengembangan Sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru.

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara utuh pernyataan mengenai fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hipotesis yang penulis ajukan adalah : “Diduga fungsi yang dijalankan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis belum optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis”.

*Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut : Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis dapat dikategorikan **kurang baik**, hal ini dapat dilihat dari kurangnya usaha Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para pegawainya, sistem administrasi yang masih sangat buruk terutama pada relevansi data yang ada dengan data di lapangan, kurang tegasnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak membayar pajak dan retribusi yang mendukung Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis, kemudian masih kurang efektifnya sosialisasi yang diberikan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat, dan jarang dilakukannya usaha dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli daerah Kabupaten Bengkalis.*

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
I.A Latar Belakang Masalah	1
I.B Rumusan Masalah.....	7
I.C Tujuan Penelitian	8
I.D Kegunaan Penelitian.....	8
I.E Sistematika Penulisan	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	
II.A Fungsi Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)	10
II.B Keuangan Daerah	12
II.C Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Bengkalis	15
II.D Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	18
II.E Pandangan dan Kajian Islam Tentang Pendapatan Asli Daerah .	26
II.F Hipotesa	31
II.G Variabel Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN	
III.A Tempat dan Waktu Penelitian	33
III.B Jenis dan Sumber Data	33
III.C Populasi dan Sampel.....	34
III.D Teknik Pengumpulan Data	34
III.E Alat Analisa data.....	35

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

IV.A Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis	36
IV.B Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis	36
IV.C Struktur Organisasi.....	38
IV.D Uraian Tugas	39

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V.A Kemampuan dan Pengetahuan	56
V.B Sistem Administrasi Yang Fleksibel	58
V.C Ketegasan dan Sanksi	63
V.D Kesadaran Masyarakat	66
V.E Pengembangan Sumber PAD Yang Baru	69

BAB VI PENUTUP

VI.A Kesimpulan.....	71
VI.B Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI

BAB I

PENDAHULUAN

I.A Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relative memadai yakni sekurang – kurangnya sebesar 25 % dari penerimaan dalam negeri dalam APBN. Namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya.

Kurang idealnya penerimaan PAD terhadap APBD Kabupaten Bengkalis yaitu hanya 210 milyar lebih sedangkan APBD Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2009 mencapai 3,7 triliun hal ini dapat kita lihat bahwa Peran Pendapatan Asli Daerah masih sangat kecil dan daerah hanya mengandalkan lobi ke pusat dari pada meningkatkan lagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis yang mempunyai potensi yang sangat besar.

Diberlakukannya konsep perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sebetulnya belum menjawab tuntas permasalahan kebutuhan dana di daerah. Dari seluruh daerah Kabupaten dan kota di Indonesia, hanya tidak lebih dari 15 % yang mengalami ‘over – budget ‘ atau ‘surplus – budget’, selebihnya mereka sangatlah kekurangan. Penyerapan Dana Alokasi Umum (DAU) hanya dialokasikan untuk kegiatan mereka yang semakin bertambah, hal inilah yang menjadi salah satu alasan bahwa penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih merupakan upaya yang aktual untuk dilakukan.

Sumber – sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Kreatifitas pemerintah daerah yang berlebihan dan tak terkontrol dalam memunggut pajak daerah dan retribusi daerah, akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itu Pemerintah Daerah tetap akan selalu diawasi oleh Peraturan Perundang – Undangan yang telah ditetapkan.

Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Bengkalis sebagai suatu instansi pemerintahan Kabupaten Bengkalis yang berhubungan langsung dalam meningkatkan keuangan daerah mempunyai peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis dan menggali lagi sumber – sumber yang mendukung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar semua kebutuhan keuangan daerah untuk pembangunan di Kabupaten Bengkalis tercapai, oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Bengkalis harus meningkatkan fungsi – fungsi kerjanya dan dapat lebih memaksimalkan fungsinya dengan strategi – strategi yang matang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis.

Kabupaten Bengkalis sebagai suatu Kabupaten yang mempunyai potensi sumber daya yang sangat besar mengharuskan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) harus mempunyai peran yang aktif dalam menggali sumber – sumber pendapatan yang ada, sehingga Dinas Pendapatan Daerah harus menonjolkan lagi fungsi – fungsi kerjanya yang lebih efektif.

Permasalahan – permasalahan yang sering terjadi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah banyak terjadi di lapangan, baik secara sistem administrasi pungutan maupun masalah – masalah dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria

pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan Pajak Pusat dan Pajak Propinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti memperkecil kemampuan *manuver* keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.

Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan Pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi “usaha” daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan “negosiasi” daerah terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan. Apalagi untuk tahun 2009 ini Kabupaten Bengkalis tidak mendapat lagi dana alokasi umum (DAU) yang artinya Pemerintah Daerah harus bekerja lebih efektif lagi untuk menggali sumber Pendapatan Daerah seiring bertambah beban keuangan bagi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sarana penting dalam meningkatkan sarana dan prasarana dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga sebagai sumber dana penunjang dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama masyarakat Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, perlu dilakukannya suatu penekanan fungsi pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) agar dapat mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan daerah.

Sebagai tim teknis dalam Perencanaan dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis masih harus memberikan informasi yang lebih akurat bagi Panitia Anggaran Pemerintah Daerah

dalam menyusun APBD dari sisi rencana pendapatan. Tidak dapatnya menganalisa kinerja DIPENDA Kabupaten Bengkalis dan tidak terpenuhinya data yang dibutuhkan merupakan hal yang juga sering terjadi, sehingga fokus konsentrasi Pemerintah Daerah tidak bisa terarah pada jenis – jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertentu yang memiliki kecendrungan positif untuk di kaji dan dikembangkan lebih lanjut.

Dalam melaksanakan Pendapatan Asli Daerah ini masih di jumpainya beberapa dilema atau berbagai macam dinamika pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis di antaranya seperti pada penetapan target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis yang dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel I.1 : Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2006 – 2009 (Dalam Rupiah)

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASI
2006	59.954.845.000	127.858.965.369,96	213,26 %
2007	65.198.660.000	112.355,796.049,71	172,33 %
2008	77.265.000.000	121.844.889.934,07	157,70 %
2009	100.051.500.000	138.345.456.553,81	138,27 %

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Secara teknis data tersebut tidak ada yang salah bahkan di lihat dari realisasi yang di dapat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah suatu pencapaian yang luar biasa, namum di sisi lain dapat kita lihat beberapa dilema seperti masih kecil penetapan Target Pendapatan Asli Daerah

untuk Kabupaten Bengkalis yang mempunyai potensi yang lebih besar, walaupun penetapan target ini adalah kewenangan DPRD Kabupaten Bengkalis namun secara tidak langsung Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis juga mempunyai andil dalam penetapan target tersebut, karena target yang diputuskan oleh DPRD Kabupaten Bengkalis adalah melalui usulan Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis itu sendiri.

Dilema yang dapat kita nampak lagi dari permasalahan di atas masih ada hubungannya dengan usulan yang diberikan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis kepada DPRD Kabupaten Bengkalis yaitu, secara tidak langsung dapat kita nilai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tidak dapat menentukan perkembangan zaman dari tahun ke tahun yang bertambah pesat..

Dari hasil penetapan APBD Kabupaten Bengkalis peran Pendapatan Asli Daerah juga dinilai masih sangat kecil, hal ini dapat kita lihat dari table berikut :

Table I.2 : Ringkasan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2009

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan	Rp. 1.714.117.016.868
a	Pendapatan asli daerah	Rp. 100.051.500.000
b	Dana perimbangan	Rp. 1.589.065.516.868
c	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 25.000.000.000
2	Belanja	Rp. 3.371.509.195.947,28
a	Belanja tidak langsung	Rp. 1.195.403.373.146,72
b	Belanja langsung	Rp. 2.176.105.822.800,56
	defisit	Rp. 1.657.392.179.079,28

3	Pembiayaan	Rp. 1.657.392.179.079,28
a	Penerimaan daerah	Rp. 1.752.614.544.206,66
b	Pengeluaran pembiayaan	Rp. 95.222.365.127,38
	Silpa	0,00

Sumber Data : DPRD Kabupaten Bengkalis 2009

Oleh karena berbagai masalah yang telah di uraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Fungsi Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bengkalis**”.

I.B Rumusan Masalah

Sebagai suatu instansi Pemerintahan Daerah yang langsung mengelola keuangan daerah Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) mempunyai peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berhubungan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat Kabupaten Bengkalis maka di sini perlu ditingkatkannya fungsi – fungsi dari Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) baik dalam cara kerja maupaun strategi yang digunakan.

Dengan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan suatu rumusan masalah penulisan ini yaitu “ Mengapa Fungsi Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis Tidak Berjalan Dengan Baik “.

I.C Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisa fungsi Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Bengkalis dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten bengkalis.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis.

I.D Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

3. Sebagai bahan masukan dan informasi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi pihak- pihak yang memerlukan pemahaman tentang fungsi – fungsi Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Bengkalis.
4. Sebagai bahan masukan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan fungsi – fungsinya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengakalis.
5. Dapat menambah daya nalar dan pengetahuan penulis serta dapat mengaplikasikannya ke mata kuliah yang penulis peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.

I.E Sistematika penulisan

Untuk mempermudah memahami dari penulisan penelitian ini maka penulis membuat sistematika penulisan penelitian sebagai berikut :

BAB1 (PENDAHULUAN)

Bab ini menjelaskan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II (TELAAH PUSTAKA)

Bab ini menguraikan tentang, Fungsi Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Bangkalis, Pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalis, Kendala – kendala dalam upaya upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Variabel Penelitian.

BAB III (METODE PENELITIAN)

Pada bab ini di jelaskan tentang Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Populasi Dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, dan Alat Analisa Data.

BAB IV (GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN)

Yaitu menjelaskan tentang gambaran Umum obyek penelitian yaitu Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bangkalis

BAB V (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN)

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian beserta pembahasannya.

BAB VI (PENUTUP)

Bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

II.A Fungsi Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2002), bahwa otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan kota dilaksanakan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah

Pemerintahan dalam melaksanakan fungsi – fungsinya sebagai *public servise* maupun peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan perlu di Bantu oleh intansi –intansi lain agar fungsinya dapat berjalan sebagai mana yang diinginkan oleh pemerintah dan rakyat. Oleh karena itu maka fungsi pemerintahan dalam mengelola keuangan daerah khususnya di bidang Pendapatan Daerah yang merupakan hal penting dalam mewujudkan cita – cita bangsa maka pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bengkalis di Bantu oleh suatu intansi yang bernama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Bengkalis.

Fungsi menurut PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) dikatakan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pada pasal 2 merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Pendapatan Daerah yang menjadi urusan rumah tangga daerah.

Dari pengertian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Fungsi Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Bengkalis adalah perwujudan dari segala tugas pemerintahan yaitu pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis di bidang pendapatan daerah dan sekaligus menjadi urusan rumah tangga daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis ini dipimpin oleh seorang Kepala, di mana ia berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Agar berhasil dan berdaya guna dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, maka perlu dibuat suatu uraian tugas setiap jabatan struktur yang ada dalam Peraturan Daerah. Secara umum tugas Dinas Pendapatan Daerah di jelaskan pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 18 Tahun 2005 adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pendapatan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi secara umum yaitu :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis, penyusunan rencana pelaksanaan dan pengaturan di bidang Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan Pendaftaran Dan Pendataan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah;

- c. Pelaksanaan Penetapan Besarnya Pajak dan Retribusi Daerah
- d. Pelaksanaan Pendataan Objek dan Subjek PBB yang dilaksanakan oleh direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali SPOP wajib pajak;
- e. Penyampaian SPPT, SKP, SPT dan Sarana Administrasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak serta menyampaikan DHPP PBB yang dibuat oleh Dirjen Pajak kepada pemungut PBB yang ada di bawah pengawasannya;
- f. Pengupayaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta penggalian sumber – sumber pendapatan daerah yang baru;
- g. Penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- h. Koordinasi pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya serta penagihan PBB yang dilimpahkan oleh menteri keuangan kepada daerah;
- i. Perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendapatan, penetapan, dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta PBB;
- j. Pengelolaan Administrasi Umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
- k. Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas.

II.B Keuangan Daerah

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 disebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 juga menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Manurut Sony Yuwono (at all 2008 : 42) keuangan daerah merupakan salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang harus dikelola dengan hati – hati, transparan, dan akuntabel.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel telah dan terus dilakukan melalui penyusunan berbagai Peraturan Perundang – Undangan dan Peraturan Pemerintah dan dengan cara melakukan reformasi di pengelolaan keuangan daerah.

Reformasi yang dilakukan menurut Sony Yuwono (at all 2008 ; 42) mencakup perubahan fungsi pemerintahan daerah sebagai berikut :

- a. Perubahan kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana perimbangan keuangan
- b. Perubahan prinsip pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran.
- c. Perubahan strategi pembiayaan.

Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas Tjahjanulin Domai (2002) mengatakan ada beberapa prinsip dalam mengelola keuangan daerah yaitu :

1. Akuntabilitas : adalah kewajiban bagi pengelola keuangan daerah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya.

2. Tranparansi : yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan hams selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum.
3. Keterbukaan pemberian informasi secara terbuka baik terhadap saran maupun kritik dari masyarakat.
4. Aturan Hukum : pengelolaan keuangan daerah harus berdasarkan Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan undang – undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang – undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian wewenang dalam pegenaan pajak dan dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Tjahjanulin Domai (2002) tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah :

- a. Memanfaatkan semaksimal mungkin sumber - sumber pendapatan suatu daerah.
- b. Setiap anggaran daerah yang dibuat / disusun diusahakan perbaikan-perbaikan dari anggaran daerah sebelumnya.

- c. Sebagai landasan formal dari suatu kegiatan yang lebih terarah dan teratur dan memudahkan untuk melakukan - pengawasan.
- d. Memudahkan koordinasi dari masing-masing institusi dan dapat diarahkan sesuai dengan apa yang diprioritaskan dan dituju oleh Pemerintah Daerah.
- e. Untuk menampung dan menganalisa serta memudahkan dalam pengambilan keputusan tentang alokasi pembiayaan terhadap proyekproyek atau kebutuhan lain yang diajukan oleh masing-masing institusi.

Berkaitan dengan pernyataan di atas tujuan pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi.

II.C Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalis

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 1 No. 26) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Pasal 1 No. 13) Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah daerah

Kabupaten Bengkalis dan diakui nilainya sebagai penambah dari nilai kekayaan bersih dalam tahun priode bersangkutan.

Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD menurut Undang – Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Pasal 1 No. 18) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3 Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 juga menjelaskan bahwa tujuan dari Pendapatan Asli Daerah adalah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Semua Pendapatan Daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah di mana setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Setiap SKPD memungut Pendapatan Daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dan dilarang melakukan pengutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Sesuai dengan Bab 5 Undang – Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Pendapatan Asli Daerah bersumber dari ;

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
- d. Lain – lain PAD yang sah seperti ;
 - a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - b) Jasa giro
 - c) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

- d) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Untuk Kabupaten Bengkalis sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah

(PAD) tahun 2008 terdiri dari :

1. Pajak Daerah meliputi :
 - a. Hotel lain – lain
 - b. Restoran
 - c. Hiburan
 - d. Reklame
 - e. Penerangan jalan PLN
 - f. Penerangan jalan Non PLN
 - g. Pengambilan / pengolahan bahan galian golongan “c”
 - h. Sarang burung walet
 - i. Hasil budi daya perikanan
 - j. Hasil penangkapan ikan
2. Retribusi Daerah meliputi :
 - 2.1 Retribusi jasa umum ;
 - a. Pelayanan kesehatan
 - b. Pelayanan persampahan / kebersihan
 - c. Retribusi pengganti bea cetak KTP dan akte capil
 - d. Parker di tepi jalan umum
 - e. Retribusi pelayanan pasar
 - f. Pengujian kendaraan bermotor
 - 2.2 Retribusi jasa usaha ;
 - a. Pemakaian kekayaan daerah
 - b. Pasar grosir dan atau pertokoan
 - c. Terminal
 - d. Tempat penginapan / pesenggerahan / villa
 - e. Rumah potong hewan
 - f. Pelayanan kepelabuhan
 - g. Pengelolaan limbah cair
 - h. Kapal ferry penyeberangan (KMP. Tasik Gemilang)
 - i. Pemakaian perumahan daerah
 - 2.3 Retribusi perizinan tertentu ;
 - a. Izin mendirikan bangunan (IMB)
 - b. Izin gangguan / keramaian (HO)
 - c. Izin trayek / kartu pengawasan (KP)
 - d. Izin usaha perikanan

- e. Izin peruntukan penggunaan tanah
- f. Izin pengembangan dan penangkaran sarang burung walet
- g. Izin pembuatan kapal
- h. Izin penyelenggaraan pos dan telkomunikasi
- i. Izin usaha kepariwisataan
- j. Izin usaha jasa konstruksi

3. Hasil pengelolaan kekayaan asli yang sah terdiri :

3.1 bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah;

- a. Perusahaan daerah air minum (PDAM)
- b. BUMD (PT. Bumi Laksamana Jaya)
- c. PT. Bank Riau
- d. PT. Riau Air Lines

4. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari :

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Penerimaan jasa giro kas daerah
- c. Penerimaan jasa giro pemegang kas
- d. Penerimaan jasa giro dana cadangan
- e. Penerimaan bunga deposito
- f. Tuntutan ganti kerugian daerah
- g. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pengambilan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan
- i. Pengambilan kelebihan pembayaran perjalanan dinas
- j. Pengambilan kelebihan pembayaran dari uang muka
- k. Penerimaan lain – lain

II.D Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hal penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Bengkalis bahkan yang menjadi ujung tombak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendapatan Daerah (UPTD) yang berada di daerah kecamatan masing – masing.

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis (pasal 1 huruf f)

adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis (Pasal 17 ayat 1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

Menurut undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 7 Ayat a dan b) menjelaskan dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang :

- a. Menetapkan Peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
- b. Menetapkan Peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu beberapa hal penting yang menjadi tolak ukur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu :

- a. Kemampuan dan pengetahuan

Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah tidak pernah terlepas dari kemampuan dan pengetahuan dari para pengelolanya. Kualitas sumber daya

manusia aparaturnya pajak yang kurang merata dan terbatasnya tenaga operasional, juga menjadi kendala kelancaran dalam pemberian pelayanan kepada para wajib pajak.

Sementara itu, Bahl dan Vazquez dalam Nasucha (2004) mengemukakan bahwa kelemahan sistem perpajakan yang umumnya terjadi biasanya ditandai dengan prosedur yang sudah usang, pegawai yang dibayar rendah, pegawai yang kurang terlatih, sistem perpajakan yang terlalu kompleks sehingga sulit untuk mencapai efisiensi administrasi dengan sumber daya yang tersedia sangat minim bagi kantor pelayanan pajak, keengganan pemerintah untuk menegakkan sistem yang ada dan cenderung hanya menunggu terjadinya krisis atau desakan dari luar terutama dari negara donor. Bahl menyebutkan, bahwa permasalahan dalam administrasi perpajakan di negara sedang berkembang pada umumnya adalah sistem yang kompleks, masalah sumber daya manusia dan prosedur yang sudah ketinggalan.

b. Sistem Administrasi yang Fleksibel

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya keberhasilan dalam penerimaan pajak daerah sangat ditunjang oleh pelaksanaan administrasi Pendapatan Asli daerah yang baik dan efisien. Administrasi merupakan peran penting dalam menentukan sistem Pendapatan Asli daerah, administrasi dituntut untuk mampu memenuhi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berkelanjutan dan tuntutan reformasi yang berkembang pada masyarakat. Disamping itu administrasi juga diharapkan mampu mengatasi turbulensi permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan administrasi Pendapatan Asli daerah yang efektif dan efisien.

Permasalahan dalam sistem administrasi di negara berkembang pada umumnya adalah prosedur yang ketinggalan jaman dan masalah sumber daya manusia. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan dalam sistem administrasi.

Menurut Nasucha (2004), persyaratan penting bagi perbaikan administrasi Pendapatan Asli Daerah ialah penyederhanaan sistem administrasi Pendapatan Asli Daerah, strategi dan komitmen.

c. Ketegasan dan sanksi

Pengetatan sanksi merupakan salah satu upaya penerapan hukum yang tegas dan adil terhadap masyarakat, agar mereka memenuhi peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tujuan pengetatan sanksi sebagai upaya menyadarkan masyarakat untuk membayar kewajibannya secara tepat waktu guna mencapai target penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Nurmantu (2005) sebagai hukum publik, hukum pajak memuat ketentuan tentang sanksi perpajakan baik sanksi yang bersifat administratif maupun sanksi yang berupa pidana. Secara filosofis, sanksi diberikan untuk salah satu atau gabungan tujuan-tujuan yakni sebagai hukuman atau sebagai balas dendam (Retribution), sebagai efek (deterrence), sebagai pengasingan dari masyarakat (incapacitation) dan sebagai rehabilitasi (rehabilitation).

Selanjutnya, Nurmantu (2005) mengatakan sanksi perpajakan diharapkan akan memberikan efek atau pengaruh, baik kepada wajib pajak yang telah melalaikan kewajiban perpajakannya maupun kepada wajib pajak lain yang belum melakukan tindakan yang dapat diancam dengan sanksi perpajakan

d. Kesadaran Masyarakat

Kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah yang merupakan hal pokok dalam Pendapatan Asli Daerah tidak bisa terlahir dengan sendirinya tanpa adanya kontrol dari pemerintah itu sendiri.

Selain upaya penegasan sanksi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pemerintah juga dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah harus berupaya agar masyarakat tertarik dan patuh dalam membayar kewajibannya ke daerah. Himbauan – himbauan tentang kewajiban dalam membayar Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu bentuk solusi agar masyarakat tahu arti pentingnya Pendapatan Asli Daerah bagi Daerah maupun masyarakatnya. Selain itu hal – hal seperti pemberian hadiah kepada para masyarakat yang patuh dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah juga perlu dilaksanakan agar menciptakan ketertarikan masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah.

e. Pengembangan sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2002), bahwa otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan kota dilaksanakan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah atau PAD (Sidik, 2008). Oleh karenanya penyelenggaraan otonomi daerah akan lebih berdaya guna dan berhasil guna, manakala dibarengi dengan kemampuan yang kuat dari daerah dalam mengembangkan atau meningkatkan potensi sumber-sumber keuangan secara optimal. Hal itu berarti, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya.

Mengingat tidak semua sumber pembiayaan diberikan kepada daerah, maka daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mamesah, 1995). Hal yang senada dikemukakan oleh Rasyid (2002) bahwa untuk dapat menyelenggarakan urusan rumah tangganya, daerah harus mempunyai keuangan sendiri, sehingga tidak selalu tergantung pada sumber-sumber dari pemerintah pusat. Oleh karena itu pengembangan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru sangat diperlukan dalam lebih meningkatkan peran Pendapatan Asli Daerah dalam APBD.

Dari hasil wawancara penulis dengan pegawai bidang yang mengelola PAD yaitu Bidang Penagihan maka timbul beberapa kendala yang sering dijumpai dalam meningkatkan pendapatan daerah yang ditulis dalam laporan hasil pungutan Pendapatan Asli Daerah pegawai antara lain :

- a. Secara sistem administrasi, data para wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah dari bidang pendataan sering tidak cocok dengan di

lapangan. Hal ini dikarenakan masih kurang efektifnya sistem pendataan yang dilakukan.

- b. Sulitnya menemui dan menghubungi para wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang menunda pembayaran terutama badan usaha penangkaran sarang burung walet hal ini disebabkan oleh para pengusaha burung walet tidak mendaftarkan usahanya dan pada umumnya rumah penangkaran burung walet berbeda dengan tempat tinggal para pengusaha sehingga susah dalam mencari para pengusaha penangkaran burung walet tersebut.
- c. Pemindahtanganan pemilik kios terutama di pasar sandang pangan sehingga para pemilik kios enggan membayar pajak dengan alasan mereka hanya menyewa.
- d. Masih banyak ditemui wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang meminta untuk menunda pembayarannya hingga akhir tahun.
- e. Banyaknya wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang tutup usaha dan tidak melapor kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sehingga banyak terjadi tunggakan yang tidak jelas atau semu.
- f. Sering dijumpai para wajib pajak hotel belum mampu membayar tunggaknya dengan alasan – alasan klasik seperti lampu listrik mati sehingga omset dilarikan untuk membeli bensin dan sebagainya.
- g. Kendala yang sering terjadi pada umumnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat atas kesadaran kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah terutama pada masyarakat pribumi.

Sehubungan dengan sangat pentingnya Pendapatan Asli Daerah terhadap keuangan daerah maka Pamuji (1980 ; 61) menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

Pendapat yang relatif sama juga dikedepankan oleh Ibnu Syamsi (1983 : 190) yang menempatkan keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk

mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sumber dari pelaksanaan desentralisasi fiskal yang diwujudkan melalui pemberian sumber – sumber penerimaan bagi daerah yang diperoleh dan digunakan sendiri sesuai potensinya masing – masing. meskipun kewenangan perpajakan telah diberikan kepada daerah, namun pemberian kewenangan tersebut tidak berdampak besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. hal tersebut karena, dalam pembiayaan kebutuhan daerah pada kenyataannya hanya memiliki Pendapatan Asli Daerah kurang dari 10 % dan hal tersebut sangat bervariasi di setiap daerah, yaitu antara 10 % - 50 %.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. Dengan meningkatnya PAD, akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah akan lebih leluasa membelanjakan penerimaannya sesuai dengan prioritas pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerahnya.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah merupakan kewenangan perpajakan (*taxing power*) daerah yang sangat terbatas. Kondisi itu tercermin dari rendahnya kontribusi Pendapatan Daerah terhadap

APBD, yaitu rata – rata kurang dari 10 % sehingga keadaan ini kurang mendukung akuntabilitas dari penggunaan anggaran daerah.

Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah, Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar.

Menurut Mardiasmo (2003), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan); Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat yuridis); Tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomis); Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil) serta ; Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

II.E Pandangan Dan Kajian Islam Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Mengukur keberhasilan sebuah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya dilihat dari kacamata politik tentu akan bersandar kepada salah satu sektor yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tatkala sebuah pemerintahan daerah mampu menggenjot PAD kepada grafik yang tinggi, tentu menjadi kredit point meskipun esensi keberhasilan penyelenggaran sebuah pemerintahan sebenarnya harus bertolak kepada tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Pendapatan asli daerah d pandang dari sudut kaca mata islam dapat d katagorikan sebagai zakat karena hasil dari zakat juga digunakan untuk kemashalahatan orang banyak Cuma zakat hanya diberikan kepada orang – orang yang telah dtentukan dalam islam sedangkan pendapatan asli daerah diberikan untuk semua lapis kehidupan masyarakat.

Pasal 16 UU No. 38/ 1999 dan pasal 28 Kepemenag No. 373 tentang pendayagunaan zakat mengatur bahwa distribusi hasil zakat mestilah diutamakan untuk mustahiq. Dan itu harus berdasarkan:

- a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, garim, sabilillah, dan ibnussabil),
- b. mendahulukan warga muslim yang paling tak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan,
- c. diutamakan mustahiq di wilayahnya masing-masing.

Agar pengelolaan zakat sesuai dengan maqâsid asy- syarî'ah dengan dasar masalah, diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam tentang memposisikan zakat sebagai pendapatan daerah secara umum. Sebab pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan sampai dengan pendistribusiannya harus didasarkan pada kaidah-kaidah syar'i (Qur'an dan Hadis), khususnya dalam hal pendistribusian. Kalau zakat dimasukkan kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berarti sama dengan pendapatan lainnya, maka ada kemungkinan harta zakat akan dinikmati oleh orang-orang yang tidak termasuk asnaf, seperti yang ditegaskan di dalam Q.s. at-Taubah, 9:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Meskipun hal tersebut dimungkinkan dipergunakan untuk kepentingan umum, namun masih menjadi perbedaan pendapat. Oleh karena itu, dibutuhkan ijtihad jamâ'i dari ulama-ulama fiqh dan pakar hukum Islam. Dengan demikian, sebaiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari zakat dipisah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil yang lain, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) hasil zakat mempunyai sistem sendiri yang dapat dikontrol langsung pendistribusiannya oleh masyarakat. Dalam hal ini diharapkan ulama harus berperan dan memposisikan dirinya sebagai kekuatan kontrol dihadapan pemerintah yang selama ini terkesan peran ulama lebih banyak memposisikan dirinya sebagai unsur marginal baik dalam pembangunan maupun dalam pengambilan keputusan. Selain itu, peran ulama hanya sebagai alat untuk melegitimasi ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh pemerintah.

Berbicara masalah pendapatan asli daerah pasti tidak terlepas dari pemasok utama dari Pendapatan Asli Daerah tersebut yaitu pajak. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama **al-Usyr** atau **al-Maks**, atau bisa juga disebut **adh-Dharibah**, yang artinya adalah; *“Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”*. Atau suatu ketika bisa disebut **al-Kharaj**, akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.

Pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama berbeda pendapat di dalam menyikapinya.

Pendapat Pertama : menyatakan pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Dan ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda :

الزَّكَاةُ سِوَى حَقِّ الْمَالِ فِي لَيْسَ

“Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat.” (HR Ibnu Majah, no 1779)

Apalagi banyak dalil yang mengecam para pengambil pajak yang zalim dan semena-mena, diantaranya adalah :

Pertama : Hadist Abdullah bin Buraidah dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

“ Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan oleh seorang penarik pajak, niscaya dosanya akan diampuni.” (HR Muslim, no: 3208)
Kedua : Hadist Uqbah bin ‘Amir, berkata saya mendengar Rasulullah saw bersabda :

مَكْسُ صَاحِبِ الْجَبَّةِ يَدْخُلُ لَا

“ Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara zalim).”
(HR Abu Daud, no : 2548, hadist ini dishahihkan oleh Imam al Hakim) .

Pendapat Kedua : menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam al Juwaini di Ghiyats al Umm al hlm : 267, Imam Ghazali di dalam al-Mustasyfa : 1/303, Imam Syatibi di dalam al I’tishom : 2/ 619

Para ulama yang membolehkan Pemerintahan Islam memungut pajak dari umat Islam, meletakkan beberapa syarat yang dipenuhi terlebih dahulu, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Negara sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan masalah umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan Negara yang sedang dirongrong oleh musuh.
- b. Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik dari zakat, jizyah, al usyur, kecuali dari pajak.
- c. Harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendekiawan dan tokoh masyarakat.
- d. Pemungutannya harus adil, yaitu dipungut dari – orang kaya saja -, dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh terfokus pada tempat-tempat tertentu atau untuk kepentingan kampanye saja, apalagi tercemar unsur KKN atau korupsi.
- e. Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja, ketika Negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja.
- f. Harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja.
- g. Besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja.

II.F Hipotesa

Hipotesa menurut Pamuji (2005 ; 70) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan

Maka hipotesa dari penelitian ini adalah “diduga fungsi yang dijalankan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis belum optimal dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis”.

II.G Variabel Penelitian

Sugiyono (2005 ; 38) mengatakan bahwa variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Dari pengertian di atas maka variabel dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kemampuan dan pengetahuan

Kemampuan di sini adalah kemampuan atau skill para pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri baik dari tingkat pendidikannya maupun pelatihan – pelatihan yang diberikan kepada petugas pemungut Pendapatan Asli Daerah

b. Sistem Administrasi yang Fleksibel

Sistem administrasi di sini merupakan sistem pencatatan data para wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah sehingga mudah di hitung, sederhana dan

pelayanan yang memuaskan bagi si wajib pajak dan wajib retribusi maupun petugas pemungutan.

c. Ketegasan dan sanksi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis harus tegas dalam memberikan sanksi kepada seluruh masyarakat yang menunda atau melakukan tunggakan pembayaran pajak dan retribusi daerah yang mendukung dari pendapatan asli daerah (PAD) dan juga ketegasan memberikan sanksi kepada petugas yang kurang optimasl dalam melakukan pemungutan.

d. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat ini harus didukung melalui sosialisasi maupun informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah yang di berikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat.

e. Pengembangan sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru

Sumber Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan melalui pengembangan berbagai objek baru yang bisa menambah pendapatan daerah yaitu dengan usaha melakukan penggalian sumber – sumber baru yang dimiliki Kabupaten Bengkalis yang mempunyai potensi yang sangat besar.

BAB III

METODE PENELITIAN

III.A Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Bengkalis Jalan Jendral Sudirman No. 022 Kecamatan Bengkalis.

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 10 November 2008 dan selesai pada tanggal 1 September 2009.

III.B Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menceritakan dan menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan dengan semua permasalahan yang ada dalam satu variabel.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan analisis fungsi Dinas Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dari hasil laporan dan catatan yang ada hubungannya dengan penelitian ini seperti, Struktur organisasi dan Jumlah target dan realisasi pendapatan asli daerah.

III.C Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2005 ; 90) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.

Adapun jumlah populasi dari penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis yang berjumlah 95 orang, dengan rincian pada tabel III.1 sebagai berikut :

Tabel III.1 : Rincian Jumlah Populasi

	Tingkat Pendidikan				jumlah
	S2	S1	D3	SMU/Sederajat	
Pegawai Negeri Sipil	3	12	4	52	71
Calon Pegawai Negeri Sipil	-	1	2	12	15
Tenaga Kerja Sukarela	-	2	-	7	9
Jumlah Keseluruhan	3	15	6	71	95

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang ada yaitu 95 orang. Sampel ini disebut juga dengan sensus atau sampling jenuh menurut Sugiyono (2005 ; 96) yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

III.D Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperoleh, maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Yakni cara mendapatkan data dengan mengadakan tanya jawab langsung penulis dengan responden.

2. Questioner

Yakni pengumpulan data yang digunakan dengan cara membuat daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden.

3. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.

III.E Alat Analisa Data

Dalam menganalisa data yang terkumpul dipergunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara utuh pernyataan mengenai fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

IV.A Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Melalui susunan organisasi di atas diharapkan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dapat mencapai visi dan misinya. Adapun visi dan misinya adalah sebagai berikut :

Visi : Unggul dalam mengelola dan meningkatkan penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah.

Misi :

1. Menggali sumber-sumber pendapatan daerah dan penerimaan daerah Kabupaten Bengkalis
2. Mengelola pelaksanaan pungutan pajak daerah
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sedangkan moto dari Dinas Pendapatan Daerah adalah siap menjadi pembayar pajak bukan sekedar menjadi Wajib Pajak.

IV.B Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembentukan susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berkaitan dengan itu maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 18 Tahun 2005 tentang

pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Menurut Perda Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha;
- c. Unsur pelaksana adalah bidang;

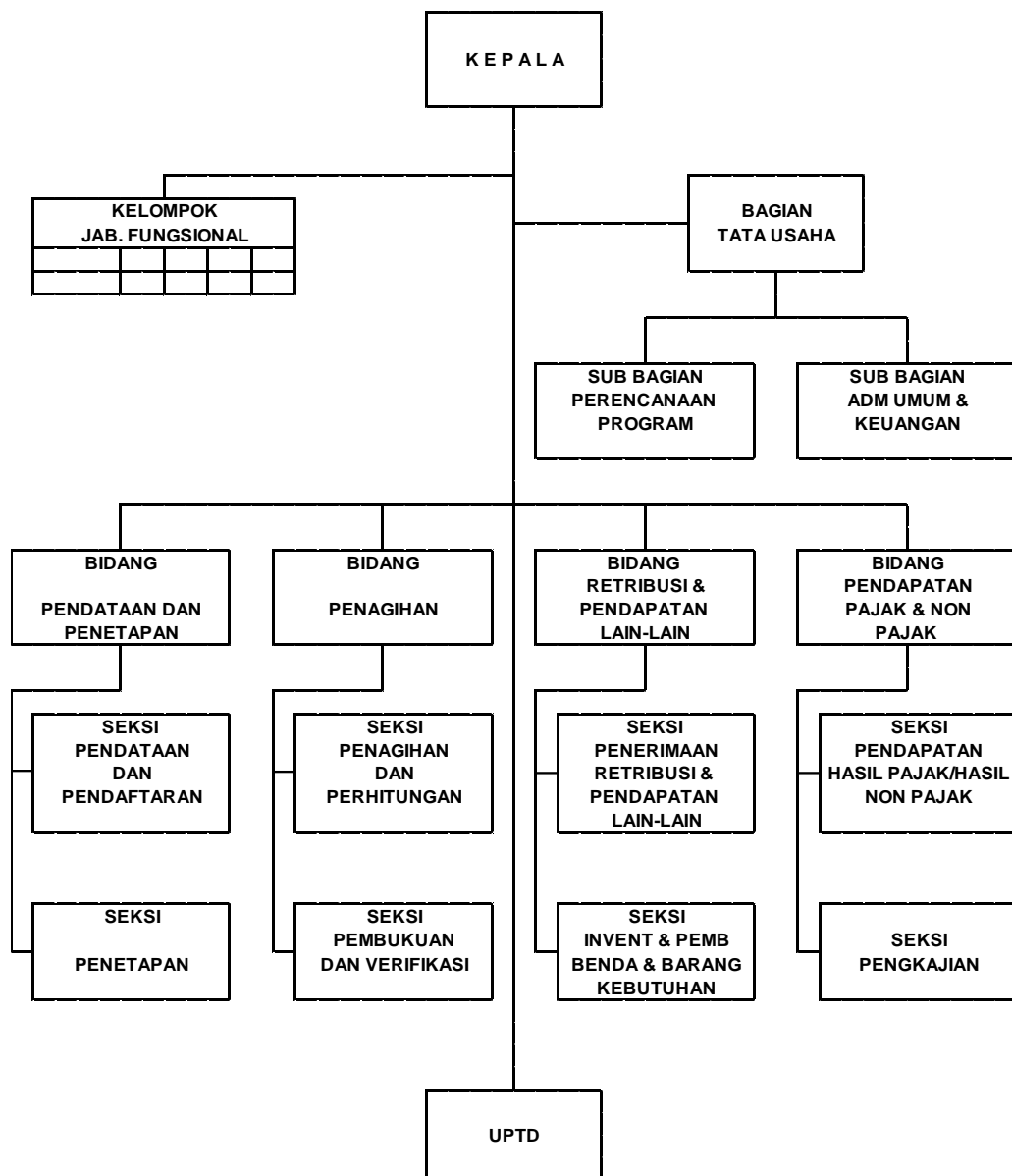
Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program
 2. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran
 2. Seksi Penetapan
- d. Bidang Penagihan, terdiri dari :
 1. Seksi Penagihan dan Perhitungan.
 2. Seksi Pembukuan dan Verifikasi
- e. Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain, terdiri dari :
 1. Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
 2. Seksi Inventarisasi & Pembukaan Benda & Barang Kebutuhan.
- f. Bidang Pendapatan Pajak dan Non Pajak, terdiri dari :
 1. Seksi Pendapatan dan Hasil Pajak / Non Pajak;
 2. Seksi Pengkajian.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok jabatan fungsional

IV.C Struktur Organisasi

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu sebagaimana bagian berikut

Gambar IV. 1
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu. 2009

IV.D Uraian Tugas

Berikut uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis :

Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Susunan Organisasi DIPENDA terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
- c. Bidang Pendapatan dan Penetapan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendataan dan pendaftaran
 - 2) Seksi Penetapan
- d. Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain, terdiri dari ;
 - 1) Seksi Penagihan dan Perhitungan
 - 2) Seksi Pembukuan dan verifikasi
- e. Bidang retribusi dan Pendapatan lain-lain, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan lain-lain
 - 2) Seksi Inventarisasi, Pembukuan Benda dan Barang Kebutuhan
- f. Bidang Pendapatan Pajak dan Non Pajak, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendapatan dan Hasil Pajak/Hasil non Pajak
 - 2) Seksi Pengkajian
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kepala

Kepala mempunyai tugas :

- a. Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
- b. Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- c. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Susunan Organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1) Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bagian tata usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan serta hubungan masyarakat
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga
- d. Pengelolaan administrasi keuangan
- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan

2) Sub Bagian Perencanaan Program

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang perencanaan dan program kerja Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian Tugas Bagian Perencanaan dan Program sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Sub Bagian Perencanaan Program
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan Program sebagai kerangka acuan atau pedoman penyusunan rencana kegiatan
- d. Menyiapkan bahan penyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Program
- e. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja atau Program Tahunan (RKT) DIPENDA, Arah Kebijakan Umum (AKU), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (RENJA SKPD) di bidang Pendapatan Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- f. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan program perencanaan
- g. Menghimpun dan menyusun bahan nota keuangan
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan program dinas
- i. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara aparatur dan publik untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan
- j. Menghimpun dan menyiapkan RKA (Rencana Kerja Anggaran) serta mengkoordinir proses pembahasan dengan instansi terkait sampai menjadi DASK
- k. Menyusun kelengkapan administrasi guna pelaksanaan kegiatan pembangunan berupa RKA, dan menyiapkan revisi (perubahan) RKA.
- l. Mengupayakan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) guna menampung usulan program pembangunan yang mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya.

- m. Menyiapkan bahan jawaban DPRD yang menyangkut rencana dan program aparaturnya maupun publik
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidangnya
- o. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban bagi atasan.
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha.

3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang Administrasi Umum dan Keuangan meliputi menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga serta Administrasi Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Uraian Tugas Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Sub Bagian Administrasi Umum dan keuangan
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpunkan dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan

- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Administrasi Umum dan Keuangan
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan administrasi umum dan keuangan
- f. Mengarahkan dan mengarsipkan surat masuk dan keluar sesuai dengan jenis permasalahannya
- g. Mengonsep surat dan naskah dinas lainnya sesuai data dan ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan
- h. Melakukan pengembangan dan menyusun formasi pegawai dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi; kenaikan pangkat, mutasi, cuti dan pensiun, absensi, pendidikan dan latihan pegawai dilingkungan Dinas;
- i. Menyusun jadwal protokoler pada acara-acara tertentu seperti kunjungan tamu dan mengkonsultasikan dengan Kepala Bagian Tata Usaha untuk mendapatkan persetujuan
- j. Mengatur, proses perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan
- k. Mengatur dan mengecek kebersihan/keamanan kantor dinas beserta halamannya agar tercipta suasana aman bersih dan indah
- l. Mengatur dan menganalisa kebutuhan perlengkapan rumah tangga serta mempersiapkan kebutuhan administrasi dan perlengkapan Dinas Pendapatan Daerah
- m. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan Dinas Pendapatan Daerah
- n. Mengusulkan kepada Kepala Bagian tentang penunjukan pemegang kas dan pembantu pemegang kas
- o. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga sukarela dan PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan penyusunan anggaran, pembukuan, membuat pertanggung jawaban serta evaluasi dan laporan kegiatan keuangan Dinas
- p. Menyiapkan bahan dan menginventarisasikan permasalahan keuangan daerah dalam rangka pengambilan kebijakan yang dapat mendukung peningkatan kinerja pengelolaan keuangan Dinas Pendapatan Daerah

- q. Menyiapkan bahan-bahan dan menginventarisasikan permasalahan keuangan daerah dalam rangka pengambilan kebijakan yang dapat mendukung peningkatan kinerja pengelolaan keuangan Dinas Pendapatan Daerah
- r. Menyiapkan bahan-bahan dan menginventarisasikan permasalahan dalam rangka koordinasi penyusunan pedoman yang berhubungan dengan penyusunan anggaran perimbangan keuangan Dinas Pendapatan Daerah
- s. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Belanja Administrasi Umum (BAU) dari Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah
- t. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian tata Usaha tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya
- u. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan dan sebagai bahan pertanggungjawaban bagi atasan
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian tata Usaha baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha.

3. Susunan organisasi Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :

1) Seksi Pendataan dan pendaftaran

Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang pendataan dan pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian Tugas tersebut sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendataan dan Pendaftaran berdasarkan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dengan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan

- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan ;
- d. Mengonsep surat dan naskah didinas lain yang berkaitan dengan Seksi Pendataan dan Pendaftan sesuai data dan ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis tentang Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan
- f. Menginventarisasikan permasalahan yang berhubungan dengan pendataan dan pendaftaran pendapatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya
- g. Menyiapkan bahan kualifikasi dan persyaratan-persyaratan pendataan dan pendaftaran pendapatan serta menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk dipublikasikan
- h. Memberikan pelayanan teknis administrasi terhadap pendataan dan pendaftaran pendapatan
- i. Melakukan evaluasi terhadap pendataan dan pendaftaran pendapatan
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya
- k. Membuat laporan pelaksanaan Seksi Pendataan dan Pendaftaran berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan bahan pertanggung jawaban bagi atasan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pendataan dan Penetapan

2) Seksi Penetapan

Seksi Penetapan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penetapan pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menusun rencana kegiatan Kepala Seksi Penetapan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dengan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan ;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang - undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Penetapan Pendapatan
- c. Mencari , mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan Penetapan Pendapatan
- d. Mengonsep surat dan naskah dinas lain yang berkaitan dengan Seksi Penetapan sesuai data dan ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis tentang Penetapan Pendapatan
- f. Menginventarisasikan permasalahan yang berhubungan dengan penetapan pendapatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya
- g. Menyiapkan bahan kualifikasi dan persyaratan-persyaratan penetapan pendapatan serta menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk di publikasikan
- h. Memberikan pelayanan teknis administrasi terhadap penetapan-penetapan
- i. Melakukan evaluasi terhadap penetapan pendapatan
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penetapan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban bagi atasan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pendataan dan Penetapan

4. Susunan Organisasi Bidang Pendapatan Pajak dan Non Pajak, terdiri dari :

1) Seksi Pendapatan dan Hasil Pajak/Non Pajak

Pendapatan dan Hasil Pajak/Non Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Pendapatan dan Hasil Pajak/Non Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian Tugas Seksi Pendapatan dan Hasil Pajak/Non Pajak sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendapatan dan Hasil Pajak/Hasil Non Pajak berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dengan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pendapatan dan Hasil Pajak/Hasil Non Pajak
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Pendapatan dan Hasil Pajak/Hasil Non Pajak
- d. Mengonsep surat dan naskah dinas lain yang berkaitan dengan Seksi Pendapatan dan Hasil Pajak/Hasil Non Pajak sesuai data dan ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis tentang Pendapatan dan Hasil Pajak/Hasil Non Pajak
- f. Menginventarisasikan permasalahan yang berhubungan dengan Pendapatan dan Hasil Pajak/Non Pajak dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya
- g. Menyiapkan bahan kualifikasi dan persyaratan-persyaratan Pendapatan dan Hasil Pajak/Hasil Non Pajak serta menyampaikn kepada Kepala Dinas untuk di publikasiakan
- h. Memberikan pelayanan teknis administrasi terhadap Pendapatan dan Hasil Pajak/hasil Non Pajak
- i. Melakukan evaluasi terhadap Pendapatan dan Hasil Pajak/Hasil Non Pajak

- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendapatan Pajak dan Non Pajak tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi
- l. Pendapatan dan Hasil Pajak/Hasil Non Pajak sesuai dengan sumber data yang ada untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban bagi atasan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak dan Non Pajak baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan Pajak dan Non Pajak.

2) Seksi Pengkajian

Seksi pengkajian mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis serta layanan di bidang Pengkajian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian Tugas Seksi Pengkajian sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengkajian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dengan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pengkajian
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Pengkajian
- d. Mengonsepsi surat dan naskah dinas lain yang berkaitan dengan Seksi Pengkajian sesuai data dan ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis tentang Pengkajian
- f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Pengkajian dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya

- g. Menyiapkan bahan kualifikasi dan persyaratan-persyaratan Pengkajian serta menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk di publikasikan
- h. Memberikan pelayanan teknis administrasi terhadap Seksi Pengkajian
- i. Melakukan evaluasi yang berhubungan dengan Seksi Pengkajian
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pendapatan Pajak dan Non Pajak tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengkajian sesuai dengan sumber data yang ada untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban bagi atasan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak dan Non Pajak baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan Pajak dan Non Pajak.

5. Susunan Organisasi Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, terdiri dari :

1) Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis serta layanan di bidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian Tugas Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dengan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
- d. Mengonsep surat dan naskah dinas lain yang berkaitan dengan Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain sesuai data dan ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaka, pedoman dan petunjuk teknis tentang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
- f. Menginventarisasikan permasalahan yang berhubungan dengan Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya
- g. Menyiapkan bahan kualifikasi dan persyaratan-persyaratan Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain serta menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk dipublikasikan
- h. Memberikan pelayanan teknis administrasi terhadap Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
- i. Melakuakn evaluasi terhadap Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggungjawaban bagi atasan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Retribusi dan pendapatan Lain-lain.

2) Seksi Inventarisasi dan Pembukuan Benda dan Barang Kebutuhan

Seksi Inventarisasi, Pembukuan Benda dan Barang Kebutuhan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Inventarisasi, Pembukuan Benda dan Barang Kebutuhan sesuai ketentuan yang berlaku.

Uraian Tugas Seksi Inventarisasi dan Pembukuan Benda dan Barang

Kebutuhan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Inventarisai, Pembukuan Benda dan Barang Kebutuhan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dengan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Inventarisasi, Pembukuan Benda dan Barang Kebutuhan
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Inventarisasi, pembukuan Benda dan Barang Kebutuhan
- d. Mengonsep surat dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan Seksi Inventarisasi, Pembukuan Benda dan Barang Kebutuhan sesuai data dan ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan
- e. Menyiapkan bahan menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis tentang Inventarisasi, Pembukuan Benda dan Barang Kebutuhan
- f. Menginventarisasikan permasalahan yang berhubungan dengan Inventarisasi, pembukuan benda dan barang kebutuhan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya
- g. Menyiapkan bahan kualifikasi dan persyaratan-persyaratan inventarisasi, pembukuan benda dan barang kebutuhan serta menyampaikan kepada kepala dinas untuk dipublikasikan
- h. Memberikan pelayanan teknis administrasi terhadap inventarisasi dan pembukuan benda dan barang kebutuhan
- i. Melakukan evaluasi terhadap inventarisasi, pembukuan benda dan barang kebutuhan
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Retribusi dan pendapatan lain-lain tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Inventarisasi, Pembukuan Benda dan Barang Kebutuhan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/peretimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban bagi atasan

- l. Melaksanakn tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang dan Pendapatan Lain-lain.

6. Bidang Penagihan

1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi

Seksi Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Pembukuan dan Verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian Tugas Seksi Pembukuan dan Verifikasi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembukuan dan Verifikasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dengan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pembukuan dan Verifikasi
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Pembukuan dan Verifikasi
- d. Mengonsep surat dan naskah dinas lainnya yang vberkaitan dengan Seksi Pembukuan dan Verifikasi sesuai data dan ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis tentang Pembukuan dan Verifikasi
- f. Menginventarisasikan permasalahan yang berhubungan dengan Pembukuan dan Verifikasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya
- g. Menyipkan bahan kualifikasi dan persyaratan-persyaratan Pembukuan dan Verifikasi serta menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk di publikasikan
- h. Memberikan pelayanan teknis administrasi terhadap Pembukuan dan Verifikasi
- i. Melakukan evaluasi terhadap Pembukuan dan Verifikasi

- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penagihan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembukuan dan Verifikasi berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban
- l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Penagihan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penagihan.

2) Seksi Penagihan dan Perhitungan

Seksi Penagihan dan perhitungan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Penagihan dan Perhitungan Pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian Tugas Seksi Penagihan dan Perhitungan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penagihan dan Perhitungan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dengan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Penagihan dan Perhitungan
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Penagihan dan Perhitungan
- d. Mengonsep surat dan naskah dinas lain yang berkaitan dengan Seksi Penagihan dan Perhitungan sesuai data dan ketentuan yang berlaku untuk diajukan kepada atasan
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis tentang Penagihan dan Perhitungan
- f. Menginventarisasikan permasalahan yang berhubungan dengan Penagihan dan Perhitungan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya
- g. Menyiapkan bahan kualifikasi dan persyaratan-persyaratan Penagihan dan Perhitungan serta menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk dipublikasikan

- h. Memberikan pelayanan teknis administrasi terhadap Penagihan dan Perhitungan
- i. Melakukan evaluasi terhadap Penagihan dan Perhitungan
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penagihan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penagihan dan Perhitungan sesuai dengan sumber data yang ada untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban bagi atasan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penagihan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V.1 Analisis Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Berlakunya Undang - Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah di Indonesia telah membawa konsekuensi logis bahwa terjadi perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kewenangan yang begitu luas tentunya akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan kewenangannya itu. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya

Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Untuk itu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai instansi terkait masalah ini harus mempunyai peran aktif yang besar dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis sehingga Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis harus meningkatkan kembali fungsi – fungsinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

V.A Kemampuan dan Pengetahuan

Memang tidak dipungkiri lagi bahwa suatu keberhasilan itu selalu didukung oleh mantapnya sumber daya manusianya. Begitu juga halnya dengan keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus didukung oleh sumber daya manusianya itu sendiri dalam hal ini ditujukan pada kemampuan dan pengetahuan para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis.

Kemampuan dan pengetahuan ini juga tidak bisa datang dengan sendirinya melainkan juga harus mendapat perhatian oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis yang mengelola Pendapatan Asli Daerah. Kemampuan dan pengetahuan ini dapat dimiliki oleh para pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis kepada pegawainya. Untuk melihat perhatian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawainya dapat kita lihat pada tabel V.1 sebagai berikut :

Tabel V.1 : Pendidikan dan Pelatihan Yang Diberikan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Pegawainya

no	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat sering	5 Orang	5,3 %
2	Sering	31 Orang	32,6 %
3	Cukup Sering	3 Orang	3,2 %
4	Kadang – Kadang	56 Orang	58,9 %
5	Tidak sama sekali	0 Orang	0 %
Jumlah		95	100 %

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Penulis 2009

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sangat jarang sekali memberikan Pendidikan dan Pelatihan kepada pegawainya dalam menunjang kegiatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis, hal ini terbukti dengan banyaknya responden menjawab kadang – kadang yaitu sebanyak 56 orang atau 58,9 %, dan hanya 5 orang (5,3 %) responden yang menjawab sangat sering.

Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan tentunya diharapkan dapat membawa pengaruh kepada kemampuan dan pengetahuan pegawai yang mengikutinya ke arah yang lebih baik. Agar pendidikan dan pelatihan yang diberikan dapat diambil manfaatnya maka pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus mempunyai segi efektifitas yang bagus, untuk mengetahui efektifitas pendidikan dan palatihan yang diberikan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dapat kita lihat pada tabel V.2 sebagai berikut :

Tabel V.2 : Efektifitas Pendidikan Dan Pelatihan Yang Diberikan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

No	Katagori jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat efektif	8 Orang	8,4 %
2	Efektif	19 Orang	20 %
3	Cukup efektif	12 Orang	12,6 %
4	Kurang efektif	56 Orang	59 %
5	Tidak efektif sama sekali	0 Orang	0 %
Jumlah		95 Orang	100 %

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Penulis 2009

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis kepada pegawainya kurang efektif, hal ini dapat dilihat dari jawaban 56 (59 %) responden yang menjawab demikian, dan hanya 8 orang (8,4 %) responden yang mengatakan sangat efektif.

Dari hasil jawaban responden di atas dapat kita pahami bahwa pendidikan dan pelatihan yang diberikan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis kepada pegawainya kurang mendukung kemampuan dan keahlian pegawainya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis.

Upaya yang semestinya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan ini adalah dengan cara : meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat pajak dengan melakukan pelatihan secara kontinyu; penyederhanaan prosedur dan sistem serta pengelolaan pajak yang efisien serta menciptakan jaringan pelaksana pungutan yang tersebar di setiap wilayah kerja

V.B Sistem Administrasi Yang Fleksibel

Kemudahan dan administrasi yang tidak berbelit – belit merupakan suatu hal yang didambakan masyarakat dalam pelayanan apa pun di instansi pemerintah, oleh karena itu banyak kadang masyarakat mengeluh akan administrasi yang dilakukan di instansi pemerintah yang sangat berbelit – belit. Secara otomatis terkadang masyarakat menjadi malas untuk melakukan aktifitas administrasi di instansi- instansi.

Tidak lepas dari masalah itu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis juga mengalaminya terutama dalam hal pendataan para Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah di lapangan. Banyak para Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah yang masih belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah. Untuk mengetahui Bagaimana sistem pendataan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dapat kita lihat di tabel V.3 sebagai berikut :

Tabel V.3 : Sistem Pendataan Yang Dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

No	Katagori jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat mudah	8 Orang	8,4 %
2	Mudah	18 Orang	18,9 %
3	Cukup mudah	9 Orang	9,5 %
4	Tidak mudah	60 Orang	63,2 %
5	Sangat Tidak mudah	0 Orang	0 %
Jumlah		95 Orang	100 %

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Penulis 2009

Dari tabel di atas dapat dipastikan bahwa sistem pendataan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis di lapangan tidak mudah, hal ini dipertegas dengan jawaban 60 orang (63,2 %) responden yang menjawab tidak mudah sehingga masih banyak para Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah yang belum terdaftar, dan hanya 8 orang atau 8,4 % responden yang menyatakan sangat mudah.

Masalah administrasi ini tidak hanya terlepas dari masalah masih banyaknya para Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah yang belum terdaftar tetapi juga terkait pada masalah relevansi data yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dengan keadaan di lapangan, hal tersebut dapat kita lihat pada tabel V.4 sebagai berikut :

Tabel V.4 : Relevansi Data Para Wajib Pajak Dan Wajib Retribusi Daerah Dengan Di Lapangan

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat relevan	8 Orang	8,4 %
2	Relevan	24 Orang	25,3 %
3	Cukup relevan	3 Orang	3,2 %
4	Kurang relevan	59 Orang	62,1 %
5	Tidak relevan sama sekali	1 Orang	1,0 %
Jumlah		95 Orang	100 %

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Penulis 2009

Dari hasil jawaban responden di atas dapat kita ketahui bahwa pendataan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini bidang pendataan dan penetapan banyak yang kurang relevan dengan data di lapangan. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya jawaban responden menjawab kurang relevan yaitu sebanyak 59 orang atau 62,1 %, dan hanya 8 orang atau 8,4 % responden yang menyatakan sangat relevan.

Dari hasil wawancara penulis kepada pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis diperoleh keterangan banyak pegawai yang mengeluh karena masih banyak atau tidak relevannya data para Wajib Pajak Daerah dan

Wajib Retribusi Daerah yang ada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dengan yang ada di lapangan, sehingga banyak para Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah yang tidak di jumpai dan secara otomatis hal ini mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis.

Sistem Administrasi yang baik juga harus didukung oleh cara kerja yang baik pula dari pegawainya. Hal ini menyangkut ketepatan penulisan laporan hasil Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis sehingga laporan yang di buat dapat digunakan secara cepat dalam penyusunan APBD dan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan dengan cepat.

Cara kerja dan ketepatan penulisan laporan hasil Pendapatan Asli Daerah yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dapat kita lihat dari hasil jawaban responden pada tabel V.5 sebagai berikut :

Tabel V.5 : Ketepatan Waktu Pencatatan Laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis

No	Katagori jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat tepat waktu	0 Orang	0 %
2	Tepat waktu	28 Orang	29,5 %
3	Cukup tepat waktu	66 Orang	69,5 %
4	Kurang tepat waktu	1 Orang	1 %
5	Tidak tepat waktu sama sekali	0 Orang	0 %
Jumlah		95 Orang	100 %

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Penulis 2009

Dari jawaban responden pada tabel 5.5 di atas dapat diketahui bahwa Pencatatan Laporan Hasil Pendapatan Asli daerah Kabupaten Bengkalis cukup tepat waktu hal ini terlihat dari jawaban 66 orang atau 69,5 % responden namun tidak ada responden yang mengatakan sangat tepat waktu.

Dari keterangan jawaban responden di atas dapat kita pahami bahwa pencatatan laporan hasil Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan hanya cukup tepat waktu atau bisa dikatakan pencatatan laporan hasil Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis belum dilaksanakan dengan maksimal, hal ini juga dirasakan penulis pada saat pengumpulan data terutama data Pendapatan Asli Daerah tahun 2008, di mana penulis hanya mendapat data sampai dengan bulan November saja, bahkan penulis meminta kembali pada bulan maret 2009 data tersebut belum siap dikerjakan.

Untuk mendukung dalam penulisan laporan Pendapatan Asli Daerah agar tepat waktu maka harus didukung juga oleh cara penghitungan Pendapatan Asli Daerah yang praktis dengan sistem penghitungan mudah, untuk melihat seberapa mudah cara penghitungan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dapat kita lihat dari jawaban responden pada tabel V.6 sebagai berikut :

Tabel V.6 : Sistem Penghitungan PAD Yang Dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

No	Katagori jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat mudah	2 Orang	2,1 %
2	Mudah	24 Orang	25,3 %
3	Cukup mudah	6 Orang	6,3 %
4	Tidak mudah	62 Orang	65,3 %
5	Sangat Tidak mudah	1 Orang	1 %
Jumlah		95 Orang	100 %

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Penulis 2009

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Sistem Penghitungan PAD yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tidak mudah, hal ini dibuktikan dengan jawaban 62 orang atau 65,3 % responden sehingga secara otomatis berhubungan dengan waktu penyelesaian laporan Pendapatan Asli Daerah yang dibuat, dan hanya 2 orang atau 2,1 % responden yang menjawab sangat mudah.

Dengan adanya perbaikan sistem administrasi Dinas Pendapatan Daerah yang lebih sederhana, diharapkan administrasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dapat dilaksanakan dengan lebih rapi terkendali, sederhana dan mudah dipahami baik oleh masyarakat maupun aparat pajak..

V.C Ketegasan dan Sanksi

Ketertiban para Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah dalam membayar hendaknya juga harus didukung oleh peraturan yang benar – benar di terapkan kepada masyarakat. Ketegasan dalam memberikan sanksi juga harus

benar- benar dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis kepada para masyarakat yang tidak mau membayar, sehingga hal ini menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang lain yang tidak membayar dan efek tertib dalam membayar sehingga tidak ada lagi ada para Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah yang tidak mau membayar.

Banyaknya para Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah yang dijumpai petugas pungutan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah yang belum membayar dapat kita lihat dari jawaban responden pada tabel V.7 sebagai berikut :

Tabel V.7 : Para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah Yang Tidak Membayar

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat sering	60 Orang	63,1 %
2	Sering	25 Orang	26,3 %
3	Cukup Sering	3 Orang	3,2 %
4	Kadang – Kadang	7 Orang	7,4 %
5	Tidak sama sekali	0 Orang	0 %
Jumlah		95 Orang	100 %

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Penulis 2009

Dari jawaban responden di atas ternyata masih sangat sering dijumpai oleh petugas pemungut Pendapatan Asli Daerah para Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah yang tidak membayar dengan jumlah jawaban 60 orang atau 63 % responden dan tidak adanya responden yang menjawab tidak sama sekali. Hal ini tentunya sangat berpengaruh sekali dengan hasil Pendapatan Asli Daerah yang didapat.

Dengan masih banyaknya para Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah yang belum membayar tentunya harus didukung dengan ketegasan sanksi yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, untuk melihat hal tersebut kita dapat lihat dari hasil jawaban responden pada tabel V.8 sebagai berikut:

Tabel V.8 : Sanksi Yang Pernah Dikenakan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Para Wajib Pajak Dan Retribusi Daerah Yang Tidak Membayar

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat sering	4 Orang	4,2 %
2	Sering	20 Orang	21,1 %
3	Cukup Sering	3 Orang	3,2 %
4	Kadang – Kadang	60 Orang	63,1 %
5	Tidak pernah sama sekali	8 Orang	8,4 %
Jumlah		95 Orang	100 %

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Penulis 2009

Dengan masih banyak para Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah yang masih sangat sering tidak membayar seharusnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis harus memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang tidak membayar, namun yang terjadi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis hanya kadang – kadang saja memberikan sanksi kepada Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah yang tidak membayar hal ini terbukti dengan jawaban responden yang memilih jawaban kadang – kadang sebanyak 60 orang dengan persentase 63,1 %, dan hanya 4 orang atau 4,2 % responden yang

menjawab sangat sering, dan kalau pun ada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis hanya memberikan surat peringatan saja tidak sampai pada pengadilan.

Adanya ketegasan sanksi sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Dalam melakukan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya, manusia mempunyai keterbatasan rasional dan berperilaku oportunistik yang melatarbelakangi keputusan untuk patuh atau tidak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Perilaku rasionalitas adalah perilaku ekonomis yang dapat didekati dengan teori ekonomi. untuk mengantisipasi penghindaran pajak perlu dipikirkan kebijakan mengenai struktur penalti dan probabilitas untuk menangkap penghindaran pajak dan pemberian sanksi.

V.D Kesadaran Masyarakat

Ketidak patuhan masyarakat dalam membayar Pendapatan Asli Daerah biasanya tidak seratus persen berasal dari masyarakat itu sendiri. Hal ini menyangkut perhatian pemerintah yang harus berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri dengan berbagai cara atau sistem strategi yang baik.

Untuk melihat peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pendapatan Asli Daerah dapat kita lihat pada tabel V.9 sebagai berikut ;

Tabel V.9 : Sosialisasi Pendapatan Asli Daerah yang Diberikan Kepada Masyarakat

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat sering	6 Orang	6,3 %
2	Sering	25 Orang	26,3 %
3	Cukup Sering	8 Orang	8,4 %
4	Kadang – Kadang	56 Orang	59 %
5	Tidak sama sekali	0 Orang	0 %
Jumlah		95 Orang	100 %

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Penulis 2009

Dari keterangan jawaban responden di atas maka dapat kita pahami bahwa sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat dinilai jarang dilakukan, hal ini dapat kita lihat dari banyak responden menjawab kadang – kadang pada tabel 5.9 di atas yaitu sebanyak 56 orang atau 59 %, dan hanya 6 orang atau 6,3 % responden yang menjawab sangat sering.

Sosialisasi hendaknya dilakukan bukan sekedar pemberitahuan saja namun harus dilihat segi keefektifitasnya terhadap masyarakat, untuk melihat seefektif mana sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dapat kita lihat pada tabel V.10 sebagai berikut :

Tabel V.10 : Efektifitas Sosialisasi Pendapatan Asli Daerah yang Diberikan Kepada Masyarakat

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat efektif	11 Orang	11,6 %
2	Efektif	18 Orang	19 %
3	Cukup efektif	12 Orang	12,6 %
4	Tidak efektif	54 Orang	56,8 %
5	Tidak efektif sama sekali	0 Orang	0 %
Jumlah		95 Orang	100 %

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Penulis 2009

Berdasarkan jawaban responden di atas maka dapat kita jelaskan bahwa sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat dinilai tidak efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis hal ini didukung dengan jawaban 54 orang atau 56,8 % responden, dan hanya 11 orang atau 11,6 % responden yang menjawab sangat efektif

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di lihat bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis hanya menempelkan himbauan Pendapatan Asli Daerah pada kantor – kantor camat yang ada di Kabupaten Bengkalis, sehingga sosialisasi kurang merata dilakukan pada seluruh masyarakat dan tentunya hal ini sangat mempengaruhi dari banyaknya jumlah para pembayar Pendapatan Asli Daerah tersebut.

V.E Pengembangan Sumber PAD Yang Baru

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya juga harus didukung dengan meningkatkan dan menggali kembali sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru, sehingga sumber – sumber penerimaan tidak kaku pada sumber yang telah ada, apalagi Kabupaten Bengkalis memiliki sumber daya alam dan sumber lainnya yang dinilai sangat besar dibandingkan daerah lain, sehingga hal – hal yang berkaitan dengan penggalian dan pengembangan sumber Pendapatan Asli Daerah sangat perlu dilakukan. Untuk melihat keseriusan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengembangan sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru dapat kita lihat pada tabel V.11 sebagai berikut:

Tabel V.11 : Kegiatan Pengembangan Sumber Pendapatan Asli Daerah yang Baru

No	Katagori jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat sering	9 Orang	9,5 %
2	Sering	28 Orang	29,5 %
3	Cukup Sering	3 Orang	3,1 %
4	Kadang – Kadang	54 Orang	56,8 %
5	Tidak pernah sama sekali	1 Orang	1,1 %
Jumlah		95 Orang	100 %

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Penulis 2009

Dari jawaban responden tersebut dapat kita pahami bahwa kegiatan pengembangan sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru kadang – kadang dilakukan oleh DIPENDA Kabupaten Bengkalis, hal ini terbukti dengan jawaban

54 orang atau 56,8 % responden, dan hanya 9 orang atau 9,5 % responden yang menjawab sangat sering.

Usaha dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis tentunya juga harus ditinjau dari segi efektifitas usaha tersebut dalam menimbulkan berbagai sumber penerimaan yang baru bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis. Untuk melihat seberapa efektifkah usaha yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam menimbulkan objek – objek baru dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis dapat kita lihat pada tabel V.12 sebagai berikut :

Tabel V.12 : Efektifitas Usaha Pengembangan Pendapatan Asli Daerah yang Baru

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat efektif	17 Orang	17,9 %
2	Efektif	13 Orang	13,7 %
3	Cukup efektif	11 Orang	11,6 %
4	Tidak efektif	54 Orang	56,8 %
5	Tidak efektif sama sekali	0 Orang	0 %
Jumlah		95 Orang	100 %

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Penulis 2009

Secara jelas kita dapat lihat bahwa segala kegiatan pengembangan sumber Pendapatan Asli daerah yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis selama ini tidak efektif dalam menimbulkan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru, hal ini didukung dengan jawaban 54 orang atau 56,8 % responden, dan hanya 17 orang atau 17,9 % responden yang menjawab sangat efektif.

BAB VI

PENUTUP

VI.A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan tentang Fungsi Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Bengkalis Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis maka penulis mengambil kesimpulan atau interpretasi dan diakhiri dengan saran – saran dari keseluruhan uraian dan penjelasan sebagai berikut.

Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis dapat dikategorikan *kurang baik*, hal ini dapat terlihat dari :

1. Dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dinilai sangat jarang sekali melakukan pendidikan dan pelatihan kepada para pegawainya, sehingga kurang membawa pengaruh terhadap kemampuan dan pengetahuan para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dan kurang menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis itu sendiri.
2. Sistem Administrasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dinilai masih tidak baik, karena masih dijumpai baik itu masalah sistem pendataan, relevansi data yang kurang akurat antara data yang berada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dengan di lapangan, waktu

pencatatan laporan penerimaan PAD yang tidak tepat waktu dan sistem penghitungan PAD yang dinilai tidak mudah dalam penghitungannya.

3. Dalam melakukan pungutan Pendapatan Asli Daerah ternyata masih sangat seringnya dijumpai oleh petugas pemungut masyarakat yang tidak mau membayar atau melakukan tunggakan pajak dan retribusi namun Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis juga kurang tegas memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak membayar kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia.
4. Kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah Kabupaten Bengkalis ternyata kurang didukung oleh giatnya sosialisasi yang harus diberikan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat, dan sosialisasi yang diberikan selama ini ternyata kurang efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Usaha dalam Pengembangan sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten juga jarang sekali dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sehingga usaha yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis kurang efektif dalam maningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis.

VI.B Saran

Dari permasalahan yang diuraikan di atas, maka disini peneliti akan memberi saran bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis maupun jajaran yang terkait untuk mengatasi permasalahan yang terjadi khususnya pada Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

- a. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis hendaknya melakukan pembinaan terhadap pegawainya baik secara administrasi maupun kegiatan operasional untuk menambah kemampuan dan pengetahuan para pegawainya.
- b. Melakukan sosialisasi peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah kepada masyarakat secara berkesinambungan.
- c. Guna mengetahui tingkat keberhasilan kinerja bagi aparat pengelola pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukannya rapat evaluasi interen minimal dua kali dalam satu tahun.
- d. Untuk mempermudah dalam mencari data para Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah hendaknya pihak pandataan selalu menambah data alamat tempat tinggal pada SKPD atau SKRD yang ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalis.

DAFTAR PUSTAKA

- Mamesah, D.J. *Sistem Adminitrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama 2000.
- Mardiasmo. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya memperkuat Basis Perekonomian Daerah*. Jurnal Ekonomi Rakyat, Th I-No.4-Juni 2002, <http://www.ekonomirakyat.org>, 2002.
- Materi workshop. *Sistem Perencanaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Tim pengembangan pajak dan retribusi daerah, Bengkalis 2006.
- Nasucha, Chaizi. *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktek*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia 2004
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit 2005.
- Pamudji, S. *Pembinaan Perkotaan Di Indonesia*. Ichtiar, Jakarta, 2008.
- Syamsi, Ibnu. *Dasar – Dasar Kebijakanaksanaan Keuangan Negara*. Bina Aksara, Jakarta, 2008.
- Sidik, Machfud. *Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah*. website,2008.
- Sugiyono. *Metode penelitian administrasi*. CV. Alfabeta, Bandung, 2005.
- Tjahjanulin, Domai. *Administrasi Keuangan Daerah*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, 2002.
- Yuwono, Sony cs. *Memahami APBD dan Permasalahannya*. Bayu Media, Malang, 2008.

Zain, Ahmad. *Hukum Pajak Dalam Islam*. www.arrisalah.net, 2010

Undang – Undang. *Tentang Pendayagunaan Zakat*. Nomor 38 Tahun 1999

Undang – Undang. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Nomor 33 Tahun 2004.

Undang – Undang. *Tentang Pemerintahan Daerah*. Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Bupati Bengkalis. *Tentang Uraian Tugas Subbagian Dan Seksi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis*. Nomor 46 tahun 2005.

Peraturan Daerah. *Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bengkalis*. Nomor 18 tahun 2005.

Peraturan Pemerintah. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Departemen Dalam Negeri, Nomor 58 tahun 2005.

Peraturan Pemerintah. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Indonesia*. Nomor 58 tahun 2005.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 : Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2006 – 2009	5
Table I.2 : Ringkasan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2009	6
Tabel III.1 : Rincian Jumlah Populasi.....	4
Tabel V.1 : Pendidikan dan Pelatihan Yang Diberikan DIPENDA Kab.Bengkalis Kepada Pegawainya.....	56
Tabel V.2 : Efektifitas Pendidikan Dan Pelatihan Yang Diberikan DIPENDA Kab. Bengkalis.....	57
Tabel V.3 : Sistem Pendataan Yang Dilakukan DIPENDA Kab. Bengkalis .	59
Tabel V.4 : Relefansi Data Para Wajib Pajak Dan Wajib Retribusi Daerah Dengan Di Lapangan	60
Tabel V.5 : Ketepatan Waktu Pencatatan Laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis	61
Tabel V.6 : Sistem Penghitungan PAD Yang Dilakukan DIPENDA Kabupaten Bengkalis	63
Tabel V.7 : Para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah Yang Tidak Membayar	64
Tabel V.8 : Sanksi Yang Pernah Dikenakan Oleh DIPENDA Kabupaten Bengkalis Kepada Para Wajib Pajak Dan Retribusi Daerah Yang Tidak Membayar.....	65
Tabel V.9 : Sosialisasi Pendapatan Asli Daerah yang Diberikan Kepada Masyarakat.....	67
Tabel V.10 : Efektifitas Sosialisasi Pendapatan Asli Daerah yang Diberikan Kepada Masyarakat.....	68
Tabel V.11 : Kegiatan Pengembangan Sumber Pendapatan Asli Daerah yang Baru	69
Tabel V.12 : Efektifitas Usaha Pengembangan Pendapatan Asli Daerah yang Baru	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.....	38
---	----

DAFTAR PERTANYAAN

ANALISIS FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH (DIPENDA)

KABUPATEN BENGKALIS

DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KABUPATEN BENGKALIS

A. Identitas Peneliti

Nama : Rudy Agustian
Nim : 10576002273
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas : UIN SUSKA RIAU

B. Petunjuk Pengisian

1. Angket ini dimaksudkan untuk keperluan ilmiah (Penulisan Skripsi). Oleh karena itu diharapkan kepada Bapak / Ibu untuk dapat kiranya memberikan informasi / data sesuai dengan fakta yang ada.
2. Jawaban yang Bapak / Ibu berikan tidak ada pengaruhnya terhadap pekerjaan Bapak / Ibu.
3. Jawablah pertanyaan – pertanyaan ini sesuai dengan fakta yang ada dengan memberi tanda silang (X) pada setiap jawaban yang Bapak / Ibu pilih.
4. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Semoga Bapak / Ibu selalu dalam lindungan Nya, Amin.

C. Identitas Responden

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Tingkat Pendidikan :
Alamat :

D. Pertanyaan

- a. Kemampuan Dan Pengetahuan
 1. Apakah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sering melakukan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) dalam membantu meningkatkan PAD kepada pegawainya?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Cukup Sering
 - d. Kadang – Kadang
 - e. Tidak sama sekali
 2. Menurut saudara sudah efektifkah Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) yang diberikan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis kepada pegawainya?
 - a. Sangat efektif
 - b. Efektif
 - c. Cukup efektif
 - d. Kurang efektif
 - e. Tidak efektif sama sekali

b. Sistem Administrasi yang Fleksibel

1. Bagaimanakah sistem pendataan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis terhadap para wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah ?
 - a. Sangat mudah
 - b. Mudah
 - c. Cukup mudah
 - d. Tidak mudah
 - e. Sangat tidak mudah
2. Apakah data para wajib pajak dan wajib retribusi daerah sudah relevan dengan di lapangan ?
 - a. Sangat relevan
 - b. Relevan
 - c. Cukup relevan
 - d. Kurang relevan
 - e. Tidak relevan sama sekali
3. Bagaimanakah hubungan pencatatan laporan Pendapatan Asli Daerah dengan ketepatan waktu ?
 - a. Sangat tepat waktu
 - b. Tepat waktu
 - c. Cukup tepat waktu
 - d. Kurang tepat waktu
 - e. Tidak tepat waktu
4. Bagaimanakah sistem penghitungan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis selama ini ?
 - a. Sangat mudah
 - b. Mudah
 - c. Cukup mudah
 - d. Tidak mudah
 - e. Sangat tidak mudah

c. Ketegasan dan sanksi

1. Adakah para wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah yang tidak mau membayar atau telat membayar kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis ?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Cukup sering
 - d. Kadang - kadang
 - e. Tidak pernah sama sekali
2. Selama ini sudah adakah para wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah diberikan sanksi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis ?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Cukup sering
 - d. Kadang - kadang
 - e. Tidak pernah sama sekali

- d. Kesadaran masyarakat
1. Apakah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Pendapatan Asli Daerah ?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Cukup sering
 - d. Kadang - kadang
 - e. Tidak pernah sama sekali
 2. Menurut saudara sudah efektifkah sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat tentang Pendapatan Asli Daerah ?
 - a. Sangat efektif
 - b. Efektif
 - c. Cukup efektif
 - d. Tidak efektif
 - e. Sangat tidak efektif
- e. Pengembangan sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru
1. Apakah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sering melakukan kegiatan dalam mengembangkan sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru?
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Cukup sering
 - d. Kadang – kadang
 - e. Tidak pernah sama sekali
 2. Sudah efektifkah usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam menciptakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru ?
 - a. Sangat efektif
 - b. Efektif
 - c. Cukup efektif
 - d. Tidak efektif
 - e. Sangat tidak efektif